

## BAB IV

### KESAMAAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM ANTARA IKHWANUL MUSLIMIN DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Pada bab ini, saya akan menganalisis dan menjelaskan kesamaan pemikiran politik antara Ikhwanul Muslimin dan PKS. *Pertama*, pada sub bab ini akan dibahas mengenai pengaruh ideologi dan manhaj Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Kedua, kesamaan pandangan mengenai demokrasi. Kesamaan pandangan ini dilihat dan ditinjau dari dua aspek, pemerintah (konsep-proses-penerapan) dan trias politica. Kemudian yang ketiga, kesamaan pandangan dalam menjalankan fungsi parlemen dengan sistem syura, ini dijelaskan dan dianalisis dengan pendekatan behavioralis dan kesamaan konsep serta substansi. Keempat, cara transmisi ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap PKS.

#### A. Pengaruh Ideologi dan Manhaj IM terhadap PKS

Sebelum kita menganalisis kesamaan pandangan antara Ikhwanul Muslimin dan Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia. Kita harus lebih dahulu melihat pengaruh ideologi dan manhaj dakwah Ikhwanul Muslimin di PKS. “Apakah itu penting?” sangat penting melihat pengaruh itu terlebih dahulu, “Apakah ideologi dan manhaj dakwah tersebut masih eksis dan dipakai tidak saja sampai para kader Tarbiyah membentuk KAMMI tapi hingga kini sudah membentuk partai, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Kita bisa melihat dan

diuraikan pada bab dua dan tiga. Seperti yang kita ketahui, bahwa Tarbiyah PKS itu diadopsi dan diambil dari gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin. Jadi, sebenarnya pengaruh pemikiran Ikhwanul Muslimin ini tidak berhenti sampai Partai Keadilan terbentuk tapi hingga Partai Keadilan Sejahtera terbentuk dalam AD/ART dan visi-misinya masih mengadopsi pemikiran IM dan Tarbiyah masih ada hingga kini. Kita akan buktikan dalam penjelasan selanjutnya.

PKS merupakan partai yang menjadikan Ikhwanul Muslimin sebagai acuan utama dalam gerakan politiknya. Partai ini banyak mengadopsi pemikiran IM, baik dalam ideologi politik, manhaj dakwah, maupun pemahaman keislamannya. Oleh karena itu, banyak kader PKS yang menyebut partainya sebagai “anak ideologis” IM. Para aktivis PKS dengan penuh kesadaran menyebut diri mereka sebagai kader Ikhwanul Muslimin. Di kalangan kader Tarbiyah, PKS didaku sebagai IM-nya Indonesia. Bahkan, PKS ditenggarai pernah merencanakan Indonesia sebagai sentrum perjuangan Ikhwanul Muslimin, tapi itu hingga kini tak dapat dibuktikan. Itulah sebabnya PKS memiliki hubungan dekat dengan berbagai kelompok di Timur Tengah, baik ormas maupun partai politik yang menjadikan IM sebagai acuan ideologinya.<sup>133</sup>

Produk-produk tertulis resmi IM, baik Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, produk Munas IM, maupun risalah-risalah Syaikh Hasan al-Banna serta pemikiran para tokoh IM yang lain banyak dipelajari oleh kader PKS, dan sangat berpengaruh pada pembentukan pandangan-pandangan politik maupun keagamaan mereka. Banyak unsur-unsur dasar pemikiran IM yang diadopsi

---

<sup>133</sup> M.Imdadun Rahmat, *op.cit*, h 97.

menjadi bangunan pemikiran yang membentuk jati diri PKS. Ini tidak mengherankan karena pengaruh IM terhadap kader PKS terjadi sejak awal terbinanya gerakan dakwah kampus era 1970-an sebagai embrio PKS.

Selanjutnya, bentuk-bentuk keorganisasian IM juga mengilhami bentuk-bentuk organisasi yang dipakai PKS. Pemikiran IM juga sangat mempengaruhi keputusan-keputusan resmi partai ini, di samping juga sangat mewarnai materi, model, serta pola-pola pendidikan dan pengkaderan PKS. Hasilnya, pemikiran-pemikiran IM menjadi acuan utama, baik secara resmi oleh partai maupun para kadernya.

Sebagaimana diuraikan diatas, pengaruh IM dalam pembentukan ideologi PKS sangatlah besar. Mendalamnya pengaruh IM dalam bangunan pemikiran politik PKS ini dapat dimengerti karena pemikiran-pemikiran IM telah disemai semenjak awal masa-masa embrional partai ini. Untuk penjelasan lebih detail akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya mengenai cara transmisi ideologi Ikhwanul Muslimin ke PKS.

Kemudian, kita akan membuktikan pengaruh ideologi IM di PK/PKS. Pada awalnya, ketika LDK ini berkembang menjadi Partai Keadilan pada 1998, pengaruh Ikhwanul Muslimin terasa semakin kuat. PK melanjutkan dasar-dasar Islam yang didakwahkan melalui gerakan Tarbiyah dalam lingkup LDK. Ideologi dan manhaj gerakan yang telah diletakkan pada masa sebelum menjadi partai,

pembakuan-pembakuan serta institusionalisasi ideologi maupun manhaj dalam kerangka kepartaian.<sup>134</sup>

Hingga tahap ini, semakin banyak buku-buku IM yang diterjemahkan seiring dengan makin banyaknya penerbit-penerbit yang dikelola oleh kalangan Tarbiyah. Kajian terhadap pemikiran-pemikiran tersebut juga semakin intensif. Dampaknya, intensitas transmisi yang disertai pengaruh IM semakin menguat di kalangan aktivis PKS.

Menurut penelitian Aay Muhammad Furqon (mantan redaktur majalah Tarbawi-sebuah majalah yang dikelola aktivis PK/PKS) jejak-jejak pemikiran IM dalam gerakan politik Islam di Indonesia sangat terlihat terutama terkait dengan munculnya sistem usroh, halaqoh, dan Tarbiyah yang mengadopsi filosofi gerakan IM.

Dalam konteks Partai Keadilan, pengaruh IM sangat kental dalam filosofi sebagai *verstehen* partai yang digunakan untuk memahami kenyataan Indonesia pada era kekuasaan otoriter. Dari sini lalu lahir dua nomenklatur yang menandai filosofi PK, yaitu "Jati Diri" Partai dan "Manifesto" Partai. Berdasarkan nomenklatur tersebut, kian jelas bahwa filosofi PK dibentuk berdasarkan konsepsi Tarbiyah, pemaknaan terhadap syari'at Islam, konsepsi negara Islam, serta konsepsi tentang khilafah.<sup>135</sup>

Dalam landasan filosofis terdapat penegasan bahwa Islam merupakan kaca mata pandang untuk memahami realitas politik maupun untuk membangun

strategi-strategi perjuangan politik. Partai ini hendak membuktikan kebenaran sebuah aksioma dalam dunia politik bahwa Islam merupakan agama universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan dengan berbagai dimensinya yang kompleks.

Islam dalam konsepsi para aktivis PK tergambar dalam pernyataan berikut:

*“Islam adalah sistem hidup universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, materi dan sumber daya alam, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan fikrah, aqidah yang lurus dan ibadah yang benar.” Keuniversalan itu sebagai inti dan pokok-pokok ajaran Islam yang bernilai perintah kepada kaum muslimin untuk diterapkan secara utuh. Islam adalah suatu tata hidup yang meliputi agama, politik, negara, dan masyarakat.*

Pemahaman PK terhadap Islam sama persis dengan apa yang disampaikan Hasan al-Banna tentang Islam. Menurut Aay, secara eksplisit apa yang dipahami PK dan tertulis dalam filosofinya begitu artikulatif mengutip pernyataan Hasan al-Banna: “Islam adalah akidah dan ibadah, negara dan kewarganegaraan, toleransi dan kekuatan, moral dan materiil, peradaban dan perundang-undangan”. Menurut Aay, pernyataan ini kian menguatkan citra PK sebagai “kembar siam” Ikhwanul

Pada awal berdirinya, partai jaringan dakwah kampus ini telah mendeklarasikan dirinya sebagai partai Islam dan dakwah. Dalam arti, bahwa partai ini mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada semua orang dan merealisasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan. Hal yang sama terjadi ketika PK berubah menjadi PKS pada tahun 2002. PKS merupakan kontinuitas ideologi, pemikiran, serta manhaj perjuangan PK. Bahkan, ketika telah menjadi PKS, tampak terjadi penguatan ideologi dan agenda Islamis yang lebih nyata dan artikulatif. Dalam konteks pergeseran ini, PKS menjadi semakin dekat dengan IM, baik dari sisi ideologi, pemikiran, maupun langkah-langkah politik yang ditempuhnya. Kentalnya persinggungan PKS dengan IM ini terlihat pada kejujuran PKS dalam menerapkan ideologi Islam dan memperjuangkan berlakunya sistem sosial Islam, dan sistem politik Islam.

Dalam Anggaran Dasar disebutkan bahwa PKS adalah partai berasaskan Islam. Partai ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 dan mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>137</sup> Sedangkan sasaran perjuangan PKS adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri, bermartabat, bertanggung jawab, peduli,

... dan keadilan serta mewujudkan pemerintahan yang jujur, bersih



3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan, dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerja sama, dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dan merealisasikan agenda reformasi.
7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kezaliman, khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

Selain sebagai partai dakwah, PKS juga menjadikan Islam sebagai ideologinya.<sup>140</sup> Bangunan ideologi PKS berpijak pada prinsip utama bahwa Islam merupakan konsep yang utuh dan sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan.

Dalam dasar pemikiran Kebijakan Dasar PKS termaktub bahwa "Islam adalah sistem integral yang mampu membimbing umat manusia menuju kesejahteraan lahir dan batin, duniawi dan ukhrawi. Kesejahteraan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui dua kemenangan, yaitu kemenangan abad (futih

khashah) dan kemenangan politik (futuh ammah). Kemenangan pribadi diraih dengan ketaqwaan yang bersifat individu, sedangkan kemenangan politik diraih dengan ketaqwaan kolektif. Dakwah sistemik dan terus menerus adalah satusatunya jalan menuju dua kemenangan tersebut.<sup>141</sup>

Oleh karena itu, PKS memahami Islam sebagai aturan yang mengikat dalam hal ubudiyah (peribadatan), mu'amalah (interaksi atas manusia), dan siyasah (politik kenegaraan). Dengan demikian sistem ritual, kemasyarakatan, dan negara harus diatur dengan ketentuan Islam. Adalah sebuah keharusan bagi setiap muslim untuk berjuang menegakkan kehidupan yang Islami dan menerapkan syari'at Islam sebagai hukum publik.<sup>142</sup>

Dilihat dari prinsip dasar ini, ideologi PKS merupakan kontinuitas dari ideologi yang dikembangkan kalangan Tarbiyah yang sangat berorientasi pada Ikhwanul Muslimin. Oleh karena itu, menjadi hal yang wajar ketika menjadi partai pun di mana keberadaannya merupakan respon terhadap perkembangan politik dan sosial yang terjadi di Indonesia. Ideologi IM sangat kental mewarnai PKS.

Mengenai pengaruh ini, Abdi Sumaithi, deklarator PK/PKS yang juga dikenal sebagai ideolog Tarbiyah, mengemukakan bahwa PKS memang mencoba menyerap, bukan mengadopsi, sebisa mungkin pemikiran-pemikiran politiknya.

Sebab masyarakat Ikhwanul Muslimin sangat kaya dengan berbagai literatur

Akan tetapi, yang diserap oleh PKS itu hanya pemikiran-pemikiran IM yang bersifat umum dan baru beberapa persen saja.

Menurut tokoh yang juga anggota Majelis Syura PKS ini, konsep dasar Ikhwanul Muslimin yang diserap PKS, antara lain, bahwa Islam bersifat universal. Oleh karena itu, PKS memandang bahwa Islam mencakup seluruh bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konsekuensinya, semua segmen atau bagian dari kehidupan ini tidak ada yang lepas dari nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam harus menjadi acuan utama bagi seluruh kehidupan. Berdasarkan hal ini, tidak ada pemisahan antara politik, ekonomi, sosial, budaya dengan nilai-nilai Islam.

Dengan kenyataan di atas, tokoh yang akrab disebut Abu Ridlo ini pun membenarkan penilaian orang bahwa PKS adalah anak ideologis IM sejauh yang dimaksud adanya kesamaan cita-cita politiknya, yakni terwujudnya tatanan sosial politik yang tunduk pada syari'at Islam. Di sisi lain, dia menolak jika PKS disebut sebagai anak ideologis IM dalam pengertian kesamaan ideologi sepenuhnya.

Melihat kebijakan dasar yang dirumuskan PKS sebagaimana tersebut di atas, tampak sangat kental adanya semangat yang kuat untuk menjadikan Islam sebagai dasar filosofis, sumber ide, landasan, nilai, perspektif berpikir, serta acuan pembuatan sistem dan aturan dalam rangka menyelesaikan masalah bangsa dan negara. Visi ini tidak saja dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai Islam sebagai kultur yang mewarnai segala aspek kehidupan sosial ekonomi dan

politik. Tetapi juga terciptanya sistem Islam secara kultural yang menjadi kerangka sistemik kemasyarakatan, perekonomian, serta kenegaraan.

Aspek lain yang menonjol dari rumusan di atas adalah keinginan PKS untuk menjadi bagian dari kekuatan pro perubahan. PKS mencita-citakan dirinya menjadi pelaku transformasi, ikon reformasi, pemberdayaan hak-hak warga negara, terbangunnya masyarakat madani dan menjadi kekuatan kritik terhadap pemerintahan agar tatanan kehidupan kenegaraan sesuai dengan tuntunan Islam.

Hal ini merefleksikan dua kenyataan sekaligus: *pertama*, PKS mewarisi semangat revivalisme Islam (kebangkitan Islam), khususnya Islamisme di Timur Tengah. Kebangkitan Islam yang menyerukan “Islam sebagai solusi” dan “Islam sebagai alternatif” dan sistem lain, seperti budaya Barat (westernisasi), modernisme, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, serta alternatif bagi sistem politik sekular ala konsep *nation state*. Semangat mengubah sistem sosial politik ke arah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam merupakan ide dasar berbagai eksponen revivalisem Islam Timur Tengah khususnya Ikhwanul Muslimin.<sup>143</sup> *Kedua*, Kelahiran PK/PKS merupakan bagian dari respon terhadap perjuangan reformasi. Keikutsertaan PKS direpresentasikan secara nyata oleh KAMMI yang menghimpun para kader Tarbiyah dalam proses penggulingan Soeharto pada tahun 1998. Para aktivis ini kemudian hari turut membantu kelahiran PK. Oleh karena itu, semangat perjuangan meraih perubahan dan terwujudnya masyarakat madani juga mewarnai pemikiran dan agenda PK/PKS.

iii. di dalam hal ini, semangat reformasi sebagai semangat

revivalisme Islam ala IM dalam diri PKS tampak lebih menonjol. Pada saat dideklarasikan sebagai PK, semangat reformis dan demokratisasi terlihat menonjol, sedangkan warna Islamis/revivalis masih samar. Pada rumusan PK, retorika tentang agenda perbaikan bangsa dan isu-isu demokrasi dan reformasi sangat mendominasi produk-produk PK, sementara itu, rumusan verbal mengenai agenda perjuangan-perjuangan penerapan syari'at Islam sebagai hukum formal belum dikemukakan secara tersurat.

Hal ini bisa kita pahami dengan dua cara pandang: *pertama*, kelahiran PKS bersamaan dengan masa bergolaknya reformasi sehingga semangat berpartisipasi dalam proses perubahan bangsa ini sangat kuat. Hal ini dimungkinkan karena peran-peran aktivis KAMMI dalam pembentukan serta rumusan jati diri partai masih cukup dominan. Sementara perubahan menjadi PKS merupakan buah dari kekalahan dalam kancah persaingan politik dalam Pemilu 1999. Ini menyebabkan PKS terstimulasi untuk mengurangi komitmennya terhadap agenda kebangsaan dan bergeser ke arah menguatnya agenda Islam. Bersamaan dengan itu, konsolidasi kekuatan para aktivis PKS berlatarbelakang Timur Tengah dan kader-kader LDK generasi awal. *Kedua*, pergeseran ini merupakan implementasi strategi *tadarruj* (penahanan perjuangan) dan penerapan taktik *sirriyah* (gerakan bawah tanah) dan *jahriyyah* (gerakan terbuka) yang dipakai oleh kalangan PKS. Strategi dan taktik di atas menuntut para kader PKS untuk bertindak hati-hati dan penuh perhitungan terkait dengan kalkulasi besar-kecilnya hambatan dan dukungan. Dengan menyadari sepenuhnya bahwa cita-cita

PKS adalah untuk dengan mainstream kekuatan politik yang menghendaki

dipertahankannya Indonesia sebagai negara kebangsaan, para kader PKS menerapkan strategi dan taktik di atas dengan sungguh-sungguh. Kegagalan dan sejarah kelam kekuatan politik Islam di masa lalu menjadi pelajaran berharga bagi kader PKS. Oleh karena itu, partai ini tidak terburu-buru menyuarakan secara terang-terangan agenda Ideologisnya.

Melihat hal di atas, bisa disimpulkan bahwa PKS tidak mencoba mengadaptasi atau mengubah ideologi IM dengan menyesuaikannya dengan konteks realitas kebangsaan Indonesia yang menganut Pancasila. Ideologi Islam ala IM tetap dijadikan acuan sepenuhnya. Penyesuaian dan adaptasi hanya dilakukan pada aplikasi atau penerapannya, bukan kandungan ideologinya. Konsistensi pada ideologi Islam ini terlihat pula dari tidak disebutnya kata "Pancasila" dalam dokumen PKS.

Sebagai gerakan keagamaan dan sekaligus gerakan politik, PKS memiliki strategi perjuangan yang bersumber dari pemikiran dan konsep dakwah yang dianutnya. Konsep gerakan yang menjadi acuan PKS adalah pemikiran dan konsep dakwah Ikhwanul Muslimin. Konsep ini diperkenalkan, dipelajari, dan disosialisasikan di kalangan Tarbiyah dan dipraktikkan dalam segala aktivitas dakwah Tarbiyah.

Anis Matta, sekjen PKS, menyatakan bahwa inspirasi-inspirasi IM dalam diri PKS memberikan kekuatan pada dua dimensi sekaligus yakni (1) Inspirasi ideologis, yakni ideologi Islam yang diacu dari IM berdasarkan pada prinsip

Islam yang lain, dan (2) inspirasi model perjuangan (*manhaj harakah*), yakni bahwa perjuangan model IM memberikan maket dari sebetuk perjuangan Islam di era setelah keruntuhan Khilafah Islamiyyah dan dominasi imperialisme Barat atas negeri-negeri muslim.

Bagi Anis Matta, hal yang menonjol dalam diri Hasan al-Banna dan IM yang sangat berpengaruh pada PKS adalah aspek pergerakannya. Hasan al-Banna dan IM tidak bergerak pada wilayah pembaharuan pemikiran sebagaimana para ulama dan gerakan lain, tetapi berjuang pada upaya mengubah wacana dan ide-ide pembaharuan tersebut menjadi gerakan. Denyut gerakan inilah yang mempertemukan dua inspirasi dan IM dalam diri PKS.<sup>144</sup>

Model pergerakan IM, yang oleh Anis Matta disebut inspirasi historis, ini terkonsep dalam rumusan dan sistem Tarbiyah. Sistem Tarbiyah menyediakan rumusan, tahapan-tahapan perjuangan, dan strategi-strateginya, serta substansi pendidikan bagi para kadernya. Sistem Tarbiyah mencakup rumusan ideologis (*mabda*), paham keagamaan (*aqidah*), cita-cita politik, sosial, dan kultural serta cara meraihnya.

Menurut Aay Muhammad, persinggungan yang paling kuat antara Hasan al-Banna dengan PK adalah dalam konsep Tarbiyah. Meski pada awalnya para aktivis pergerakan PKS tidak mengadopsi pemikiran Hasan al-Banna tentang sarana-sarana Tarbiyah, namun seiring dengan banyaknya buku-buku terjemahan dari gerakan IM dan bagaimana mengatur untuk melakukan metode Tarbiyah maka

adopsi terhadap sarana-saran Tarbiyah dari Hasan al-Banna merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari.<sup>145</sup>

Seorang ideolog PKS yang sangat berpengaruh, Abu Ridlo, sembari mengutip pernyataan Sayyid Qutb mengatakan bahwa secara umum, konsep pergerakan dakwah PKS dalam kerangka Tarbiyah mengacu pada contoh dan keteladanan Nabi Muhammad Saw. Keteladanan tersebut terukir dalam sejarah perjuangannya dalam mewujudkan sasaran-sasaran dakwah, khususnya sasaran *siyasah*-nya. Ia memandang sejarah Nabi Muhammad sebagai teladan orisinal dan simbol yang menghubungkan masalah keduniaan dan ketuhanan. Oleh karena itu, menurutnya, kehidupan Nabi Muhammad mewakili kehidupan ideal yang melampaui sejarah, waktu, dan tempat.<sup>146</sup>

Lebih lanjut, Abu Ridlo, mengutip Sayyid Qutb menyatakan bahwa dalam perjuangan hidup Rasulullah Saw terdapat empat tahap perjuangan dakwah yang harus diteladani secara utuh oleh kaum muslimin dalam upayanya memperjuangkan tergaknya sistem Islam dan hancurnya sistem Jahiliyah. Keempat tahap perjuangan tersebut adalah:

*Pertama*, Nabi Muhammad Saw mengajak pribadi-pribadi muslim untuk mebentu sebuah jama'ah, atau kelompok yang terdiri atas orang-orang yang memiliki komitmen untuk melaksanakan perintah Tuhan, dan siap menggantikan pola kehidupan masyarakat Jahiliyah Makkah dengan masyarakat yang adil dan

... dan memiliki satu kedaulatan Tuhan. Dalam tahap pertama ini

Rasulullah Saw mendidik para pengikutnya agar melepaskan diri dari kehidupan masyarakat Jahiliyah.

*Kedua*, melakukan hijrah dalam pengertian yang luas, yakni kesediaan menarik diri dari kehidupan Jahiliyah dan membentuk daerah kantong muslim yang sebenarnya.

*Ketiga*, Nabi Muhammad Saw mendirikan negara Islam di Madinah. Tahap ini dipandang sebagai masa konsolidasi penegasan persaudaraan, dan integrasi saat jama'ah mempersiapkan diri untuk perjuangan dimasa depan.

*Keempat*, Nabi Muhammad melakukan ekspansi dakwah ke seluruh penjuru dunia.

Menurut Sayyid Qutb, ungkap Abu Ridlo, untuk membentuk masyarakat muslim di abad sekarang ini, kaum muslimin harus manapaki empat tahap seperti ini dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Selain dengan tuntutan dakwah, gerakan-gerakan dakwah yang telah memasuki wilayah *siyasah* semestinya memiliki tahapan-tahapan yang jelas dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran *siyasah*-nya. Setiap tahapan hendaknya mempertimbangkan kondisi objektif, menyangkut potensi internal dan tantangan eksternal. Perguliran program juga hendaknya disesuaikan dengan tahap yang digelutinya. Dalam kerangka IM, sebagai gerakan dakwah yang menyeluruh, merumuskan tahapan-tahapan perjuangan *siyasah*-nya.

Dalam kerangka ini, tahap pertama yang dilakukan Tarbiyah/PKS adalah sosialisasi ide ke seluruh lapisan masyarakat, terutama ke kalangan inti dakwah.

Dalam kerangka ini, tahap kedua yang disebut *marhalah ta'rif*, yakni tahap

menjelaskan dan mensosialisasikan ide-ide siyasah yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Dalam tahap ini, semua komponen gerakan ikut terlibat dalam penyebaran ide dan gagasan di tengah-tengah masyarakat. Mereka diefektifkan perannya dalam membangun opini umum yang mempercepat sosialisasi ide-ide *siyasah*. Sebagai konsekuensinya, dakwah harus mampu meletakkan berbagai kebijakan dan patokan umum yang dapat mengendalikan amal *siyasi* dalam *marhalah* ini.

Tahap kedua adalah tahap persiapan keikutsertaan *musyarakah siyasah* (partisipasi politik) yang menjadi terma sentral proses demokratisasi. Pada tahap ini, masyarakat, terutama para kader partai politik, diharapkan bisa berperan sebagai subjek yang menentukan arah masa depan masyarakat dan kelompoknya. Dengan demikian, gerakan dakwah memiliki kesiapan yang cukup untuk mengarungi samudera perjuangan *siyasah* yang sarat dengan tantangan dan ujian.

Tahap ketiga ialah tahap keterlibatan langsung dalam jagat politik. Tahap ini disebut juga *marhalah tanfidz* dalam operasionalisasi semua tujuan dan agenda politik yang telah diterapkan. Dalam tahap ini, dakwah secara nyata memasuki wilayah politik dan terlibat dalam berbagai partisipasi politik. Partisipasi politik gerakan dakwah akan dihadapkan pada sejumlah tantangan internal dan eksternal yang beresiko tinggi. Ketahanan dan kemajuan aktivitas politik (*amal siyasi*) dalam tahap ini sangat ditentukan oleh kekuatannya pada tahap yang kedua, yaitu kaderisasi dan pembinaan. Medan aktivitasnya sangat luas dan kompleks. Aktivitas paling penting pada tahap ini, antara lain, mobilitas massa untuk

dialog dan demonstrasi, ikut serta dalam peristiwa-peristiwa politik penting lainnya, seperti pemilu, dan masuk ke lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Dalam rumusan yang sedikit berbeda, namun dengan makna yang sama, Anis Matta mengatakan bahwa secara garis besar, "Grand Startegy" dakwah yang dianut Tarbiyah, PK/PKS menetapkan penahapan sebagai berikut: Perjuangan dimulai dengan *marhalah* (fase), "perekrutan dan pengkaderan", baik di tingkat *qiyadah* (pemimpin) maupun *junud* (prajurit) dakwah. Pada tahap berikutnya, ketika *qiyadah* maupun *junud* telah siap maka dilanjutkan dengan tahap "mobilisasi sosial", yakni menyiapkan dan mengkondisikan umat untuk bangkit. Pada tahap selanjutnya, perjuangan ini harus melalui agenda "membentuk partai" sebagai wadah mempresentasikan dakwah di tingkat institusi.<sup>147</sup>

Secara lebih rinci, medan perjuangan yang harus digarap oleh para kader Tarbiyah/PKS adalah: pertama, medan pengorganisasian (*mihwar tanzhimi*), yakni membangun sebuah organisasi yang kuat dan solid yang menjadi kekuatan utama dalam mengoperasikan dakwah. Organisasi ini diperkuat dengan orang-orang yang tangguh sebagai lokomotif dakwah maupun pemimpin umat. Untuk kepentingan tersebut, dilakukan pembinaan dan kaderisasi yang sistematis, integral, dan berjenjang dengan waktu yang relatif panjang.<sup>148</sup>

*Kedua*, medan kemasyarakatan (*mihwar sya'biy*), yakni membangun basis massa yang luas dan merata sebagai pendukung dakwah. Medan ini bersifat terbuka bagi semua dengan orientasi kuantitas. *Ketiga*, medan institusional (*mihwar*

*mu'assasi*), yaitu membangun berbagai lembaga untuk mewartakan berbagai kerja perjuangan di seluruh sektor kehidupan dan seluruh segmen masyarakat. Selain membangun insititusi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik, kegiatan ini juga memasuki berbagai institusi yang sudah ada, termasuk pemerintahan dan militer. Dengan langkah ini maka terjalin strategis antara PKS dengan pihak-pihak tersebut.

*Keempat*, medan kenegaraan (*mihwar daulah*), yakni wilayah dakwah di tingkat negara. Bagi PKS, dakwah harus sampai pada tingkat negara karena institusi negara dipandang mampu merealisasikan secara legal dan kuat seluruh kehendak Allah atas kehidupan masyarakat.<sup>149</sup>

Mencermati penjelasan dari uraian di atas, hampir sulit dibedakan antara *manhaj* PKS dan IM. Dalam hal ini, IM bukan hanya inspirasi PKS, tetapi qiblat dan acuan. Kesamaan ini bukan hanya menyangkut penahapan, melainkan juga wilayah atau area perjuangan, strategi, hingga dasar-dasar filosofis dan keagamaannya.

## **B. Kesamaan Pandangan IM dan PKS dalam memaknai Demokrasi**

### **1. Penerapan Konsep Demokrasi IM dan PKS**

Pada poin pertama saya akan menjelaskan kesamaan IM dan PKS dalam memaknai demokrasi dengan cara melihat dan menganalisis proses dan penerapan demokrasi yang dilakukan oleh IM dan PKS. Sebelum itu kita akan menjelaskan lebih dulu definisi demokrasi menurut para ahli.

---

<sup>149</sup> Ibid, h 129.

Demokrasi menurut beberapa para ahli antara lain : *Pertama*, Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan, dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.

*Kedua*, Yusuf al-Qardhawi mengatakan demokrasi adalah wadah masyarakat untuk memilih seseorang untuk mengurus dan mengatur urusan mereka. Pimpinannya bukan orang yang mereka benci, peraturannya bukan yang mereka tidak kehendaki, dan mereka berhak meminta pertanggungjawaban penguasa jika pemimpin tersebut salah. Merekapun berhak memecatnya jika menyeleweng, mereka juga tidak boleh dibawa ke sistem ekonomi, sosial, budaya, atau sistem politik yang tidak mereka kenal dan tidak mereka sukai.

*Ketiga*, Menurut John L Esposito, pada dasarnya kekuasaan adalah dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.<sup>150</sup>

Jadi, pada dasarnya unsur di dalam demokrasi itu adanya pemerintah, pemilihan umum, undang-undang, dan rakyat. Dalam arti, adanya pemerintah

<sup>150</sup> <http://www.heritaterbangat.net/2012/11/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli.html>

yang berdaulat, dipilih secara demokratis lewat pemilihan umum oleh rakyat, rakyat terlibat aktif mengontrol kebijakan serta undang-undang yang dikeluarkan pemerintah, seperti yang Esposito katakan Pemerintah dari rakyat untuk rakyat (*feedback*). Adanya timbal balik dari rakyat jika output/produk kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau dalam implementasi kebijakannya perlu banyak perbaikan pada lini-lini tertentu. Itulah peran aktif demokrasi menurut Esposito.

Ikhwanul Muslimin memiliki pandangan mengenai konsep pemerintah yaitu pemerintahan Islam. Menurut Hasan al-Banna pemerintah Islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam.<sup>151</sup>

Pemerintah itu menjadi Islam karena agama para pelakunya, karena komitmen mereka terhadap akhlak-akhlak agama Islam dan karena melaksanakan hukum-hukum syari'at. Oleh karena itu pemerintah yang tidak menerapkan hukum-hukum syari'at Islam tidak disebut sebagai pemerintahan Islam.<sup>152</sup>

Menurut Hasan al-Banna pemerintahan merupakan salah satu dari rukun agama Islam atau salah satu dari kewajiban agama ini, tetapi kewajiban mendirikan pemerintahan Islam tidak seperti kewajiban-kewajiban agama Islam yang lain. Kata "rukun" sebagaimana sudah diketahui adalah sesuatu yang

---

<sup>151</sup> Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, op cit, h 39.

menjadi sandaran bagi sesuatu yang lain. Rukun adalah bagian yang masuk dalam substansi dan substansi itu tidak ada dengan tidak adanya rukun ini.

Islam tidak dapat direalisasikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah swt. Kecuali, jika ada pemerintahan yang menerapkan hukum-hukumnya dalam semua bidang kehidupan baik kehidupan politik, ekonomi, peradilan, hubungan Internasional maupun yang lain.

Hasan al-Banna menegaskan hal ini dengan mengatakan, "ini adalah agama Islam yang diyakini oleh Ikhwanul Muslimin dengan menjadikan pemerintahan sebagai rukunnya. Islam berpegang teguh kepada pelaksanaan sebagaimana berpegang kepada nasihat."<sup>153</sup>

Hasan al-Banna menjelaskan kewajiban-kewajiban (fungsi) pemerintahan Islam sebagai berikut:

- a. Menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang
- b. Menyelenggarakan pendidikan
- c. Mempersiapkan kekuatan
- d. Memelihara kesehatan
- e. Memelihara kepentingan umum

#### h. Menyebarkan dakwah

Kewajiban-kewajiban ini diambil dari dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hasan al-Banna menjelaskan bahwa di antara sifat pemerintahan ini adalah sikap tanggung jawab dan perhatian terhadap rakyat, berlaku adil kepada sesama umat manusia, memelihara harta benda milik rakyat dan tidak menghambur-hamburkannya.<sup>154</sup> Ikhwanul Muslimin berkaitan dengan pemerintahan ini menjadikannya sebagai salah satu pilar. Ikhwan memandang bahwa pemerintahan Islam memiliki kaidah-kaidah yang tercermin dalam ulasan Al-banna "ketika membicarakan tentang problematika hukum di Mesir dan bagaimana memecahkannya" berupa karakteristik atau pilar-pilar pemerintahan Islam. Ia berpendapat bahwa pilar-pilar itu ada tiga, yaitu :

1. Tanggung jawab pemerintahan, dalam arti bahwa ia bertanggungjawab kepada Allah dan rakyatnya. Pemerintahan, tidak lain adalah praktek kontrak kerja antara rakyat dengan pemerintahan, untuk memelihara kepentingan bersama. Perihal tanggung jawab pemerintah menurut Islam, pada dasarnya yang memiliki adalah Presiden (kepala pemerintahan), betapapun keadaannya. Dia punya hak untuk melakukan apa saja untuk kemudian menyerahkan penilaian perilakunya kepada masyarakat.

2. Kesatuan umat. Artinya, ia memiliki sistem yang satu. Yaitu Islam.

Delam arti ia harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan nasihat

3. Menghormati aspirasi rakyat. Artinya, diantara hak rakyat adalah mengawasi para penguasa dengan pengawasan yang seketat-ketatnya, selain memberi masukan tentang berbagai hal yang dipandang baik untuk mereka. Pemerintah harus mengajak bermusyawarah, menghormati aspirasi mereka, dan memperhatikan hasil musyawarah mereka.<sup>155</sup>

Dengan demikian Ikhwanul memiliki konsep pemerintah itu dan substansi dengan para pemikir di atas hampir sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses dan aksi dari Ikhwanul Muslimin dalam memperjuangkan dan menjalankan konsep ini untuk membuat Mesir lebih maju sesuai tujuan mereka dalam berpolitik.

Pada awalnya Ikhwanul Muslimin adalah gerakan sosial-keagamaan. Kontribusi gerakan sosial-keagamaan tersebut ditunjukkan dari dakwah di berbagai tempat dalam setiap kesempatan, di warung kopi, di tempat bekerja, di rumah-rumah, masjid-masjid, dan sebagainya. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, Al-Ikhwan berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperbaiki lahan pertanian, menolong fakir miskin, menangani penerangan pedesaan bahkan mengelola hasil-hasil zakat. Al-Ikhwan mendirikan masjid-masjid, klinik-klinik kesehatan, mengikutsertakan kaum wanita dalam kegiatan organisasi khususnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Di dalam bidang ekonomi Ikhwanul Muslimin ikut ambil bagian dengan mendirikan

perusahaan, toko, pabrik, pemukiman, mendirikan perusahaan dagang dan

bangunan. Dengan kegiatan ekonomi inilah Al-Ikhwan dapat membiayai aktivitas-aktivitas organisasi. Selain itu juga mendirikan sekolah-sekolah baik untuk putra dan putri, bahkan sejumlah sekolah terbuka bagi karyawan dan petani dalam rangka memberantas buta huruf.

Dimulai sejak tahun 1936, melihat kondisi Mesir yang jauh dari kemuliaan dan kesenjangan akibat penjajahan Inggris. Hasan al-Banna menempuh langkah awal dalam dunia politik dengan cara berkirim surat, pidato, ceramah atau menulis di surat kabar maupun majalah. Hasan al-Banna pada tahun itu juga mengirim pidatonya kepada Raja Faruq dan Mustafa al-Nahas (Perdana Menteri) serta Raja-raja negeri Islam. Ia menyeru mereka untuk mengikuti jalan Islam, menaati hukum, tata tertib, dan peradabannya. Hasan al-Banna juga mengirimkan kepada mereka sebuah program yang berisi 50 pasal untuk pembaharuan Mesir secara menyeluruh ke semua aspek kehidupan. Tapi, para penguasa itu sedikitpun tidak tergerak memandang sepak terjang Hasan al-Banna ini. Setelah kongres ke-5, kongres tersebut pada intinya ingin menjelaskan kembali prinsip-prinsip dakwah Ikhwanul Muslimin, dan menekankan kemampuan Islam untuk menjadi ideologi yang total.

Atas dasar ini, maka langkah Al-Ikhwan berikutnya sebagaimana ditegaskan oleh Hasan al-Banna: "Kami akan melangkah dari tahap dakwah secara umum kepada tahap dakwah secara khusus. Dari dakwah lisan kepada dakwah melalui tulisan yang disertai amal perbuatan". Ini menjadi sebuah indikasi adanya kepercayaan diri, akan dukungan, dan kemampuan Al-Ikhwan dalam

langkah-langkah politik yang nyata, sesuai dengan prinsip dan keyakinan mereka pada satu sisi dan sesuai pula dengan situasi negeri Mesir pada sisi yang lain. Program politik yang dimainkan Al-Ikhwan bertujuan akhir sebuah pemerintahan Islam. Tujuan ini dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam media-media mereka. Bagi mereka konstitusi Mesir yang menyebutkan "Islam sebagai dasar negara" tidaklah cukup. Mereka mengingatkan supaya undang-undang juga didasarkan kepada ajaran Islam demikian pula pelaksanaannya. Dengan demikian, akan terwujud suatu kondisi yang memungkinkan rakyat Mesir hidup dalam nilai-nilai Islam dalam segala aspek yaitu sosial, budaya, dan politik.<sup>156</sup>

Pada periode Mustafa al-Nahas, Hasan al-Banna mencalonkan diri sebagai wakil DPR untuk daerah Ismailiyah, mewakili Ikhwan untuk menyalurkan aspirasi mereka. Akan tetapi, Nahas memintanya mundur. Al-Banna pun mundur dan Nahas mulai menggalang perdamaian dengan Ikhwanul Muslimin. Setelah Al-Nahas mundur pada tahun 1944, Kabinet baru di bawah pimpinan Ahmad Mahir bersikap anarkis dan keham terhadap Ikhwan, anggota Ikhwan yang ingin mencalonkan diri dalam parlemen disabotase untuk tidak menang, tak terkecuali terjadi pada Hasan al-Banna.<sup>157</sup>

Akhir Januari 1950, Partai Wafd kembali menang dalam pemilu atas dukungan Ikhwan. Partai ini ingin membalas jasa Ikhwan dengan mengembalikan harta Ikhwan yang disita diantaranya: gedung markas besar, beberapa kantor

Raja Faruq oleh kalangan militer, Jamal Abd Nasser. Ia menugaskan Anwar Sadat untuk mengadakan hubungan dengan Ikhwan. Ikhwan mau membantu dengan harapan dapat membebaskan Mesir dari cengkraman asing dan dapat menciptakan suatu negara yang dibangun atas dasar hukum Islam. Tapi pada kenyataannya sejarah pemerintah yang baru tidak berbeda dengan pemerintah lama memusuhi Ikhwan. Berdasarkan prinsip yang telah ditetapkan pendirinya, maka Ikhwan tetap berusaha menjalankan dakwahnya sampai terbetuk sebuah pemerintah Islam.<sup>158</sup>

Pemilihan Umum tahun 2000 datang pada atmosfer politik yang diharapkan membawa kepada reformasi dan perubahan di Mesir. Sebelum pemilu dilaksanakan, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan penting untuk merevisi undang-undang Pemilu dan memberikan otonomi lebih besar kepada otoritas di lapangan dalam menyediakan otoritas pengawasan hukum kepada pelaksanaan pemilu. Meskipun demikian, harapan akan proses keterbukaan dalam pemilu tercederai dengan proses yang tidak demokratis dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap kotak suara dan proses pemilihan.<sup>159</sup>

Peristiwa penangkapan yang ditujukan kepada aktivis dan anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun sesaat menjelang pemilu pada akhirnya mencederai kredibilitas dari proses pemilu. Pada detik-detik menjelang pemilu sekitar 550 orang anggota termasuk 20 elit pimpinan dari Al-Ikhwan Al-Muslimun ditangkap ketika mereka sedang melakukan proses kampanye untuk menambah jumlah perolehan suara mereka. Tentu saja ini penangkapan ini bukannya tidak disengaja

pemilu. Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun mengalami kerugian politik yang besar akibat penangkapan ini dan mengakibatkan mereka hanya mampu untuk mengajukan 76 orang calon independen (termasuk seorang wanita, Gihan Al-Halafawi, yang kemenangannya di distriknya didiskualifikasi ketika pemerintah membatalkan keabsahan pemilihan di sana) pada pemilu 2000 dimana jumlah itu hanya setengah dari jumlah kandidat yang diajukan pada pemilu 1995.<sup>160</sup>

Sebagai hasil dari pemilihan umum tersebut, gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun hanya mampu memenangkan 17 kursi dari total 454 kursi anggota legislatif. Koalisi dari partai oposisi lain juga tidak menunjukkan hasil yang lebih baik dan hanya mampu merebut total suara gabungan dengan jumlah 17 kursi (hanya 3,7% dari jumlah suara). Untuk partai berkuasa NDP (National Democratic Party), kebangkitan dari calon independen pada pemilu 2000 merupakan sinyal peringatan terhadap meningkatnya tantangan atas legitimasi politik partai. Sebanyak 216 orang calon independen, kebanyakan di antara mereka adalah mantan politisi NDP, akhirnya kembali bergabung dengan partai setelah pemilu berakhir untuk mendongkrak hasil perolehan suara NDP yang menurun drastis yaitu hanya mendapat 172 kursi (sekitar 38% dari jumlah suara) yang akhirnya menjadikan NDP sebagai pemenang pemilu dengan mendapatkan 87,7% dari jumlah suara.<sup>161</sup>

Pada tahun 2005, Al-Ikhwan Al-Muslimun memulai keterlibatan dalam demonstrasi pro-demokrasi dengan Egyptian Movement for Change (Gerakan Mesir Untuk Perubahan atau yang disebut dengan Kifaya), mengakibatkan banyak

anggota Ikhwan ditangkap, sekitar 700 orang hanya pada Mei 2005. Hasil penghitungan suara pada pemilu legislatif 2005 merupakan prestasi politik tak terduga bagi gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Gerakan Ikhwan mengajukan 150 kandidat pada pemilu kali ini dan berhasil memenangkan 88 kursi di parlemen yang berarti 20% dari jumlah suara total. Memberikan fakta bahwa kekuatan oposisi lain tidak dapat menunjukkan performa yang baik dalam pemilu dan memunculkan aktor baru dalam panggung politik Mesir: Al-Ikhwan Al-Muslimun.<sup>162</sup> Al-Ikhwan Al-Muslimun memenangkan 88 kursi atau sekitar 20% dari total jumlah suara yang membentuk blok oposisi politik terbesar di parlemen, walaupun banyak kekerasan yang terjadi sepanjang proses pemilu termasuk penangkapan terhadap ratusan anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun. Sementara itu partai oposisi legal hanya memenangkan 14 kursi, ini memunculkan kembali perdebatan diantara kelompok Sekuler dan Koptik tentang kekhawatiran mereka akan kebangkitan Al-Ikhwan Al-Muslimun.

Ketidaksolidan kekuatan oposisi lainnya membuat Al-Ikhwan Al-Muslimun dapat mengeluarkan sikap politiknya tanpa mendapat tantangan berarti sebagai kekuatan utama dalam kepemimpinan oposisi. Gerakan Ikhwan juga dengan mudah dapat mengendalikan seluruh kekuatan oposisi yang berhadapan dengan rezim penguasa. Kemenangan politik Al-Ikhwan Al-Muslimun membuka kebuntuan oposisi politik dimana Ikhwan menjadi kekuatan alternatif paling potensial dengan struktur organisasinya yang tertata dengan baik. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apa yang membuat Al-Ikhwan Al-Muslimun dapat

meraih kesuksesan politik pada pemilu 2005? Efektifitas performa struktur politik yang dimiliki oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun dapat kita jelaskan melalui dua faktor utama.

*Pertama*, gerakan Ikhwan memperkenalkan retorika dan kampanye politik yang efektif berdasarkan pada sense keislaman yang kuat. Al-Ikhwan Al-Muslimun membangkitkan semangat keislaman pada masyarakat dengan menggunakan simbol-simbol keislaman. “Pada masyarakat yang mengalami dekadensi moral akibat meningkatnya angka korupsi, kejahatan dan penggunaan narkoba, nilai Islam dilihat oleh banyak orang menawarkan perbaikan kepada tata perilaku masyarakat, yang berarti dapat menjadi “obat” bagi penyakit sosial ini. Dengan demikian menjadi tidak sulit untuk menjelaskan mengapa kekuatan politik Islam dapat tampil untuk menawarkan sistem sosial-politik alternatif yang mendapat simpati yang besar dari masyarakat.”<sup>163</sup>

*Kedua*, kesuksesan gerakan Ikhwan dalam penyediaan pelayanan sosial kepada masyarakat dengan mengedepankan landasan keagamaan yang kuat. Dalam pandangan masyarakat ketika NDP itu sinonim dengan korupsi dan birokrasi yang tidak transparan, para aktivis Al-Ikhwan Al-Muslimun disadari sebagai orang-orang yang bebas korupsi dan terlihat sebagai orang-orang shaleh yang melawan korupsi dan berbagai masalah mendasar lainnya dengan semangat keislaman yang tinggi. Diperkuat lagi Al-Ikhwan Al-Muslimun tidak melihat program-program sosial yang dijalankan sebagai “alat kampanye” bagi

implementasi atas keyakinan mereka terhadap nilai-nilai Islam. Seperti yang dikatakan oleh seorang aktivis Ikhwan, “Ini bukanlah bantuan, kami menjalankan program-program pelayanan sosial dikarenakan Islam mewajibkan kami untuk melakukannya.”

Strategi Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam memprioritaskan permasalahan sosial ekonomi masyarakat membuat gerakan ini mendapatkan kredibilitas dibandingkan gerakan oposisi lain pada pemilu 2005. Al-Ikhwan Al-Muslimun telah menunjukkan dirinya sebagai “organisasi sosial yang efektif” dalam meraih dukungan dimana mayoritas masyarakat Mesir tidak terlalu paham dan mengerti tentang demokrasi ataupun perubahan politik. Sebuah polling pada tahun 2004 yang dilakukan oleh Al Ahram Center for Political and Strategic Studies menunjukkan bahwa 60 persen dari masyarakat Mesir melihat bahwa demokrasi baik nilai maupun prosedurnya tidaklah lebih penting dibandingkan pemberantasan kemiskinan, pemberantasan korupsi dan penyediaan sarana pendidikan kepada masyarakat.”<sup>164</sup>

Aktivitas-aktivitas sosial merupakan faktor utama yang menjadikan Al-Ikhwan Al-Muslimun mendapatkan dukungan masyarakat. Strategi ini memungkinkan gerakan Ikhwan untuk menghadapi status terlarangnya dan melakukan gerakan di tengah masyarakat di dalam masa-masa represi pemerintah terhadap aktivitas-aktivitas politik. Dapat dikatakan kondisi tertutupnya akses

ditilik... diintal... dan... ini... sebagai... menjadikan... aktivitas... aktivitas sosial

yang berkelanjutan menjadi sarana penting bagi pergerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam meraih dukungan masyarakat Mesir.

Penjelasan di atas telah menjelaskan konsep demokrasi dalam hal ini pemerintahan, proses menuju itu, dan aksi nyata. Diluar dari adanya kegagalan mencapai itu ketika proses mencapai tujuan untuk masuk dalam pemerintahan, Ikhwanul Muslimin telah melakukan aksi nyata dalam penerapan demokrasi. Ikhwanul Muslimin telah melakukan aksi nyata untuk mencapai tujuan mereka yaitu membangun pemerintah yang Islami dan merubah undang-undang dalam tingkat legislatif agar rakyat Mesir keluar dari kemiskinan, kesenjangan sosial, dan politik.

Penerapan demokrasi selanjutnya oleh Ikhwanul Muslimin ditunjukkan dengan terpilihnya Muhammad Mursi sebagai pemimpin tertinggi Mesir yaitu Presiden pada tahun 2012. Muhammad Mursi adalah salah satu petinggi Ikhwanul Muslimin yang dipilih secara demokratis dengan kemenangan lebih dari 50%.

Ternyata, kronologis aksi politik Ikhwanul Muslimin yang ingin merubah pemerintahan Mesir dengan masuk dalam pemerintahan sama dengan apa yang dilakukan PKS. PKS sebelumnya berasal dari Lembaga Dakwah Kampus, LDK adalah embrio kemunculan PKS di masa depan yang didirikan oleh pada aktivis kader KAMMI (Tarbiyah/LDK). Sebelumnya PKS itu adalah sebuah gerakan sosial-keagamaan yang bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Untuk melihat transformasi PKS dari gerakan sosial-

demokrasi oleh PKS. Kita perlu tahu lebih dahulu mengetahui definisi yang jelas dari konsep Islamisme dan gerakan sosial itu sendiri. Islamisme adalah keyakinan bahwa Islam memiliki seperangkat norma atau ajaran yang komprehensif dan unggul, yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk ketertiban aturan sosial. Oleh karena itu, kaum Islamis di mana pun berusaha mengganti aturan sosial-politik yang ada dengan norma atau ajaran yang didasarkan tafsir tertentu atas ajaran Islam. Hal ini bisa ditempuh melalui aksi-aksi damai atau kekerasan tergantung oleh sistem nilai yang diyakini aktor-aktor Islamis. Menurut Bubalo dan Fealy, tujuan akhir Islamisme itu sendiri adalah pendirian negara atau sistem Islam. Inilah elemen utama Islamisme yang kemudian mendorong aktivisme Islam dalam spektrum yang beragam. Dua karakteristik utama Islamisme, yakni negara Islam dan aktivisme Islam, bagaikan dua sisi satu keping uang. Kedua sisi berhubungan satu sama lain karena negara Islam tidak mungkin terwujud tanpa aktivisme Islam yang terorganisir secara rapi.

Meskipun demikian, gerakan Islamisme itu sendiri tidaklah monopolitik, gerakan Islamisme itu sendiri. Ada beragam faksi di dalam Islamisme, tapi tujuan akhirnya sama pendirian negara Islam. Dalam konteks ini, PKS lebih tepat dibaca dalam bingkai "Islamisme Moderat" daripada "Jihadis-Radikal". PKS beroperasi dalam kerangka sistem demokrasi dan menerima gagasan negara-bangsa (*nation state*). PKS juga secara tegas mengusung gerakan damai serta menghindari penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan. Dalam usaha memetakan posisi PKS di antara kemajemukan kelompok-kelompok Islam di Indonesia, mantan

D. I. PKS. Uid. at. N. u. k. id. g. a. n. u. b. u. t. P. K. S. s. e. b. a. g. a. i. p. a. r. t. a. i. I. s. l. a. m. g. a. r. i. s.

tengah. Namun, PKS masih dipandang banyak orang sebagai partai Islam garis kanan, yang sekadar menerima sistem demokrasi sebagai taktik untuk mencapai cita-cita ideologinya.<sup>165</sup>

Sebagian besar aksi kolektif dan protes yang dilakukan oleh FSLDK, KAMMI, PK, dan PKS terjadi sesudah pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998. Hanya 6,2% yang terjadi pada masa Soeharto masih berkuasa. Itupun dilakukan pada detik-detik akhir menjelang kejatuhan Soeharto. Pada awal gerakan Tarbiyah, 1980-an, nyaris tidak ditemukan aksi kolektif yang dilakukan oleh gerakan sosial ini. Mereka melakukan strategi klandestin untuk mengecoh otoriterisme dan represi Soeharto. Pada masa itu, Jamaah Tarbiyah memasuki fase hibernasi dengan lebih menitikberatkan pada agenda-agenda ritual-keagamaan.<sup>166</sup>

Barulah setelah bermetamorfosis menjadi KAMMI dan memanfaatkan gejolak sosial-politik pasca krisis ekonomi 1997, aksi-aksi kolektif Jamaah Tarbiyah melalui wadah gerakan mahasiswa bernama KAMMI muncul ke permukaan. Dengan mengusung slogan “reformasi damai”, KAMMI melakukan aksi-aksi masif di seantero negeri dari April hingga Mei 1998 ketika Soeharto mengumumkan pengunduran diri. Sampai hari ini, KAMMI masih menjadi kekuatan besar di antara gerakan-gerakan mahasiswa di Indonesia. Di samping itu, tahun 2006 menjadi tahun yang sangat aktif bagi aksi-aksi PKS karena kebanyakan peristiwa kolektif PKS dapat diklasifikasi sehubungan dengan tanggapan partai atas isu-isu di ranah domestik maupun internasional. Pada tahun

2006, misalnya, ada sejumlah peristiwa kontroversial yang ditanggapi oleh PKS: Kartun Nabi Muhammad SAW yang dimuat oleh surat kabar Denmark, invasi kembali dilakukan Israel ke Libanon Selatan, kunjungan George W. Bush ke Indonesia, gerakan anti-pornografi menyusul penerbitan majalah *playboy* versi Indonesia, dan dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi. Intensitas aksi kolektif PKS juga menanjak tajam pada 2003 menyusul serangan Amerika Serikat ke Irak dan invasi Amerika Serikat dan pasukan sekutu di Afganistan.<sup>167</sup>

Ketika KAMMI bertransformasi menjadi partai politik yaitu Partai Keadilan tampaklah bahwa para kader Tarbiyah sudah menerima demokrasi dalam konteks negara bangsa. Penerapan demokrasi ditunjukkan ketika pada tahun 1999, Partai Keadilan mengikuti pemilihan umum legislatif dan hanya mendapatkan 1,36% suara yang artinya mereka tidak lolos ketentuan elektoral treshold mengharuskan sebuah partai melewati perolehan suara 2% jika ingin mengikuti pemilu berikutnya. Itu membuat Partai Keadilan merubah namanya sesuai konstitusi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada tahun 2004, PKS pada pemilu legislatif masuk menjadi kekuatan poros tengah dengan memperoleh 7,34% atau menempatkan 45 wakilnya di DPR Pusat. Dan 2009, PKS memperoleh 7,88% atau menempatkan 57 wakilnya di DPR Pusat.

Masuknya Kader PK/PKS dalam jajaran legislatif daerah memunculkan suatu warna baru. Para anggota legislatifnya yang merupakan jebolan pengajian Tarbiyah ini menyebarkan gerakan moral di DPR. Mereka mempraktikan gaya

hidup saleh dengan ketaatan beribadah, kesantunan akhlaq, serta menjauhi kemaksiatan yang lekat dengan dunia galmour kepertaian. Salah satu bentuk gerakan moral ini adalah gebrakan politik parlementer melawan korupsi. Gerakan melawan korupsi ini oleh PK ditandai dengan upaya duet Nur Mahmudi Ismail-Soeripto (saat itu menjabat sebagai Menteri dan Sekjen Departemen Kehutanan dan Perkebunan) memberantas korupsi di birokrasi. Dalam waktu singkat, hanya dalam sepuh bulan masa kerja, tidak kurang dari 15 kasus korupsi besar telah dibongkar dan diserahkan ke kejaksaan untuk ditindak. Karena itu melibatkan konglomerat hitam, bahkan terkait dengan bisnis “Keluarga Cendana” yang selama ini tak tersentuh.<sup>168</sup>

Salah satu kasus yang fenomenal adalah penyelewengan program pemetaan udara atas kawasan hutan yang diawasi Dephutbun. Pengungkapan kasus ini berhasil menjerat Bob Hasan, seorang kepercayaan mantan Presiden Soeharto. Konglomerat yang dikenal “Raja Hutan” ini berhasil diseret ke LP Nusakambangan akibat tindak pidana korupsi dan manipulasi yang dilakukannya. Ini adalah salah satu aksi penerapan demokrasi di pemerintahan. Memberantas korupsi adalah salah satu komitmen dan tugas utama PK ketika masuk dalam pemerintahan. Dengan tujuan agar pemerintahan Indonesia dapat bersih dari budaya korupsi dan fokus kepada upaya memakmurkan serta menyejahterakan rakyat. Dan masih banyak kasus lain yang dibongkar oleh Nurmahmudi Ismail selama menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan

Gerakan anti korupsi yang oleh kalangan kader Tarbiyah sering disebut “Jihad melawan korupsi” terus berlangsung hingga berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Semangat menjalankan amanah umat tetap menggelora di hati para kader PKS yang menjadi daya dorong mereka untuk menjalankan visi mulia ini. Salamun Haris, seorang anggota DPRD I Bengkulu, menolak bagi-bagi jatah mobil seharga Rp 80 juta dengan alasan bahwa tindakan itu akan merugikan daerah sebesar Rp 3,6 Milyar. Nilai ini mencapai 10 persen dari PAD Bengkulu yang hanya Rp 36 Milyar.

Selain agenda korupsi, fraksi PKS yang bersuara keras untuk membenahi sistem pendidikan nasional yang baru, PKS mengusulkan segera disahkannya RUU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) bersama beberapa fraksi lainnya. Perjuangan PKS juga didukung oleh massa PKS yang turun ke jalan berkali-kali melakukan aksi mendukung RUU Sisdiknas tersebut.

UU dianggap strategis bagi dakwah karena memuat beberapa hal penting: *pertama*, keharusan bagi sekolah-sekolah untuk mengajarkan pelajaran agama sesuai agama siswa. Mata pelajaran agama tersebut juga harus diajarkan oleh guru yang agamanya sama dengan siswa. Keharusan ini penting bagi PKS karena banyak siswa muslim yang harus belajar di sekolah-sekolah non-Islam tidak mendapatkan pelajaran agama Islam dan bahkan banyak yang diharuskan mengikuti pelajaran agama sekolah yang bersangkutan. *Kedua*, dalam UU itu pemerintah dituntut memberikan pembiayaan bagi lembaga-lembaga pendidikan agama nonformasi dan informal. Dengan ketentuan ini, diharapkan madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, dan pengajian anak-anak bisa mendapatkan

bantuan dana dari pemerintah. Meskipun lembaga pendidikan agama non-Islam juga dibantu negara karena UU ini, namun bagi PKS, UU ini tetap menguntungkan Islam karena jumlah lembaga-lembaga pendidikan Islam jauh lebih besar.<sup>169</sup>

Di Parlemen, PKS juga menyuarakan isu-isu moral. Dalam perdebatan terkait dengan RUU Anti Pornografi Pornoaksi (RUU APP), PKS merupakan salah satu kekuatan yang berjuang keras meloloskan RUU APP tersebut. RUU ini berisi larangan bagi semua warga negara melakukan tindakan yang digolongkan asusila terkait dengan pornografi dan pornoaksi. Target utama dari RUU ini, antara lain, terbitan-terbitan yang mengeksploitasi aurat, seperti majalah porno, film-film panas, serta kebiasaan masyarakat yang tidak menutup aurat. Akan tetapi, oleh karena dalam RUU tersebut terdapat pasal-pasal yang problematik menyangkut tradisi masyarakat adat, maka PKS berhadapan dengan kekuatan lain yang menolak RUU tersebut. Akhirnya RUU tersebut tidak kunjung disahkan.<sup>170</sup>

Selain agenda nilai-nilai Islam yang diusahakan PKS dalam pemerintah. PKS juga berusaha dalam meloloskan penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), karena tiga alasan. *Pertama*, kondisi sosial dan perekonomian tidak mendukung, kenaikan harga BBM akan meningkatkan jumlah rakyat miskin. Rakyat miskin akan bertambah empat juta lebih jiwa. Pemerintah memproyeksikan penambahan jumlah orang miskin yang meningkat akibat harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter untuk premium dan solar Rp 1.000 per

liter mecapai empat juta jiwa. Angka kemiskinan bisa bertambah menjadi 11,85-12,1% sepanjang tahun 2013. Sedangkan target tahun ini sebesar 9-10,5%. Selain itu, perhitungan pemerintah secara umum sangat konservatif, kemungkinan dampak terhadap kemiskinan akan lebih besar dan juga bahkan juga akan menambah jumlah masyarakat yang mendekati miskin (*near poor*) semakin besar.

*Kedua*, kenaikan harga BBM bersubsidi untuk seluruh segmen masyarakat apalagi dengan angka yang relatif cukup tinggi akan meningkatkan beban hidup sehari-hari rakyat secara signifikan. Dan yang *ketiga*, kenaikan harga BBM bersubsidi juga akan merusak prospek ekonomi yang sudah mengalami perlambatan yang serius.<sup>171</sup> Terbukti bahwa PK/PKS menerapkan konsep demokrasi ini dalam proses dan aksinya dapat kita lihat ketika PKS masuk dalam ranah pemerintahan dan legislasi. Itu sudah membuktikan bahwa PKS telah menjalankan demokrasi, karena seperti yang John Esposito katakan bahwa di dalam demokrasi ada pemerintahan yang padanya terdapat pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan kesemua itu direpresentasikan aksi PKS dalam pemerintahan.

## **2. Penerapan Konsep Trias Politica IM dan PKS**

Pada poin kedua, kita akan menjelaskan dan menganalisis kesamaan pandangan Ikhwanul Muslimin dan Partai Keadilan Sejahtera dalam memaknai demokrasi. Kita menggunakan konsep Montesquieu mengenai demokrasi dalam

<sup>171</sup> <http://www.kabarpk.com/2013/05/inilah-alasan-pks-menolak-kenaikan.html> diakses tanggal

arti kekuasaan, Ia berpendapat bahwa setiap cabang kekuasaan itu harus terpisah, baik tugas atau fungsi serta alat kelengkapan atau organ yang menyelenggarakannya. Ia membagi kekuasaan menjadi tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif, menurut Montesquieu, adalah kekuasaan yang punya tugas atau wewenang untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif bertindak sebagai penyelenggara undang-undang. Dan kekuasaan yudikatif bertindak sebagai pemegang kekuasaan yang bertugas mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Kesamaan antara IM dan PKS dalam fungsi legislatif ditunjukkan dengan pembentukan partai politik dan mengikuti pemilihan umum. Ini mengandung arti bahwa IM dan PKS mengikuti pemilihan umum legislatif dengan mengajukan kadernya untuk masuk dalam DPR/Parlemen untuk menjalankan fungsi-fungsi legislatif seperti membuat undang-undang. PKS dulu bernama Partai Keadilan membentuk partai politik pada tahun 1998 dan mengikuti pemilihan umum legislatif pada tahun 1999 dengan perolehan suara 1,36%. Dan pada tahun 2003, PK berubah nama dengan PKS karena pada pemilu sebelumnya tidak lolos elektoral treshold. Dan pada tahun 2004, PKS mengikuti pemilu pertama kali dan mendapatkan 45 kursi di DPR (7,34%). Dan meningkat pada pemilu selanjutnya dengan perolehan 57 kursi (7,88%). Sedangkan IM mengajukan calon independen pada tahun 2000 dan 2005. Dan pada akhirnya pada tahun 2011, IM mendirikan Partai Kebebasan dan Keadilan atau Freedom Justice Party (FJP). Dan pada pemilu tahun itu juga, FJP langsung memenangkan mayoritas kursi di parlemen

Mesir. BBC memberitakan FJP yang merupakan partai politik milik Ikhwanul

Muslimin meraih 47,18% suara, seperti diumumkan Komisi Pemilihan Umum Mesir, sabtu 21 Januari 2012. Dengan perolehan itu, FJP akan menguasai 235 kursi di Majelis Rakyat/DPR. Tempat kedua diduduki oleh kubu konservatif, Partai Salafist An-Nur dengan 121 Kursi atau 25% suara. Dan sementara partai beraliran liberal, Partai Wafd, meraih 36 kursi dan partai sekuler, koalisi Mesir, memiliki 33 kursi. Dengan hasil tersebut maka parati-partai Islam menguasai sekitar dua pertiga parlemen. Kemenangan ini membuat FJP sudah memutuskan politisi seniornya, Saad ak-Katatni sebagai Ketua Majelis Rakyat.<sup>172</sup> Jadi, terbukti bahwa kedua gerakan ini menjalankan fungsi legislatif sebagai penyelenggara undang-undang karena otomatis saat sebuah partai mengikuti pemilu dan masuk dalam parlemen, mereka akan mengimplementasikan fungsi ini dalam demokrasi.

Kekuasaan eksekutif bertindak sebagai penyelenggara undang-undang. Dalam arti, penyelenggaraan undang-undang adalah Presiden, Menteri, dan para kepala daerah (Gubernur dan Walikota). Kemudian, kesamaan fungsi eksekutif ditunjukkan dengan ditunjuknya Saad ak-Katatni sebagai Ketua Majelis Rakyat pada tahun 2011 dan terpilihnya M.Mursi menjadi presiden Mesir pada tahun 2012. Sedangkan PKS pada tahun 2004 menempatkan tiga menterinya dalam kabinet Indonesia bersatu jilid pertama. Mereka adalah Anton Aprianto (Menteri Pertanian), Adhyaksa Dault (Menteri Pemuda dan Olahraga), dan Muhammad Yusuf Asy'ari (Menteri Perumahan Rakyat). Sedangkan pada kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua pada periode 2009-2014, PKS menempatkan empat menterinya, antara lain: Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika),

<sup>172</sup> [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/01/120121\\_mesir\\_pemilu.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/01/120121_mesir_pemilu.shtml) diakses tanggal

Suswono (Menteri Pertanian), Salim Segaf al-Jufri (Menteri Sosial), Suharna Surapranata (Menteri Riset dan Teknologi). Adapun kepala daerah dari PKS adalah sebagai berikut:

- 1) Nurmahmudi Ismail sebagai Walikota Depok (Periode 2005-2010 dan 2010-kini)
- 2) Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat (Periode 2008-2013 dan 2013-kini)
- 3) Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumatera Utara (Periode 2011-2013 dan 2013-kini)
- 4) Irwan Prayitno sebagai Gubernur Sumatera Utara (Periode 2010-kini)
- 5) Mahyeldi sebagai Walikota Padang (2014-kini)
- 6) Ahmad Ghani Kasuba sebagai Gubernur Maluku Utara (2013-kini)

Terbukti bahwa PKS dan IM menjalankan fungsi eksekutif dengan Presiden, para Menteri, kepala daerah yang menjalankan menjalankan atau menyelenggarakan fungsi eksekutif tersebut dalam pemerintahan. Terakhir, kekuasaan yudikatif bertindak sebagai pemegang kekuasaan yang bertugas mengadili atas pelanggaran undang-undang. Kekuasaan yudikatif ini direpresentasikan oleh Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Pengadilan yang ada di Indonesia. Fungsi yudikatif dalam konteks partai politik bisa kita cermati dengan melihat partai politik itu melanggar undang-undang atau tidak. PKS adalah pembuat legislasi atau undang-undang di parlemen, itu artinya PKS

tidak mungkin melanggar undang-undang atau tidak setuju dengan kebijakan yang

mengikat. Di dalam demokrasi, jika salah satu dalam konsep trias politica diimplementasikan tetap masuk dalam arti demokrasi itu sendiri.

Tabel 1.1

No.	Kesamaan Pandangan dalam memaknai Demokrasi
1.	<p>Legislatif : Membentuk Partai Politik.</p> <p>Partai Keadilan pada tahun 1999 dan Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2002. Sedangkan Ikhwanul Muslimin membentuk Partai Kebebasan dan Keadilan pada tahun 2012.</p>
2.	<p>Mengikuti Pemilihan Umum.</p> <p>PK pada tahun 1999 dan PKS pada tahun 2004 dan 2009. IM pada tahun 2000 dan 2005 mengajukan calon independen dari Partai Islam. Sedangkan pada tahun 2012 memenangkan Pemilu Legislatif dan Presiden dengan Partai yang dibentuknya.</p>
3.	<p>Menjalankan kekuasaan eksekutif.</p> <p>1)PKS dengan tiga menterinya pada tahun 2004 dan empat menterinya pada tahun 2009. Beberapa kepala daerah, seperti Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (2 Periode), Irwan Prayitno Gubernur Sumatera Barat, Gatot Gubernur Sumatera Utara, Ahmad Kasuba Gubernur Maluku Utara, Mahyeldi sebagai Walikota Padang (2014-kini), dan Nurmahmudi Ismail sebagai Walikota Depok (2 periode). Sedangkan IM menjadikan M. Mursi menjadi Presiden pertama Mesir dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Saad ak-Katatni sebagai Ketua Majelis Rakyat (Ketua DPR).</p>
4.	<p>Yudikatif : Fungsi yudikatif dalam konteks partai politik bisa kita cermati dengan melihat partai politik itu melanggar undang-undang atau tidak. PKS adalah pembuat legislasi atau undang-undang di parlemen, itu artinya PKS tidak mungkin melanggar undang-undang atau tidak setuju dengan kebijakan yang mengikat.</p>

### **3. Kesamaan Pandangan IM dan PKS dalam Menjalankan Fungsi Parlemen dengan Sistem Syura**

Pada sub-bab ini, kita akan menjelaskan dan menganalisis kesamaan pandangan Ikhwanul Muslimin dan Partai Keadilan Sejahtera dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam parlemen dengan sistem syura. Sub-bab ini mengambil titik poin kesamaan pandangan menjalankan fungsi parlemen dengan syura antara Ikhwanul Muslimin dan PKS. Kita akan menganalisis PKS dengan pendekatan behavioralis. Perilaku PKS dalam mengimplementasikan syura dalam parlemen liberal dan kesamaan antara PKS dan IM dalam konsep dan substansi parlemen.

Pertama, saya akan menganalisis perilaku PKS dalam mengimplementasikan syura terkait peran Majelis Syura dalam struktur internal PKS atas sebuah kebijakan dalam parlemen. Ternyata ada korelasi dan keterkaitan antara keduanya ketika PKS tidak setuju dengan sebuah kebijakan dan RUU yang akan ditimbang di DPR. Kita akan mengambil tiga contoh perilaku itu dan akan kita samakan dengan kesamaan konsep dari syura itu sendiri. Contohnya adalah PKS tidak menyetujui kebijakan pemerintah memberi bailout dana bantuan ke Bank Century, kenaikan harga BBM, dan kasus Lapindo. Memang PKS masuk dalam koalisi kabinet Indonesia Bersatu jilid satu dan dua tapi tidak berarti selamanya akan patuh dengan koalisi itu. Penyebabnya adalah kebijakan di atas menurut PKS akan merugikan pemerintah dan rakyat. Dan sebelum itu, tentu anggota dewan PKS dalam parlemen harus melewati dahulu keputusan Majelis

Syura tentang kebijakan dan RUU yang tidak disetujui tersebut. Jadi keputusan

tersebut setuju atau tidak, harus melewati Majelis Syura yang mensahkan sebuah keputusan yang akan diambil dalam parlemen.

Sebuah contoh dari implementasi syura dalam PKS adalah ketika menolak kenaikan harga BBM. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak kenaikan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi. Hal ini sudah menjadi sikap resmi partai tersebut. Diwawancarai oleh Rmol, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menjelaskan, melalui rapat tanggal 7 Mei lalu, pihaknya sepakat menyerahkan keputusan yang terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan politik, salah satunya terkait kenaikan harga BBM, kepada Majelis Syuro, yang mendelegasikan kewenangannya kepada Badan Pekerja Majelis Syuro. Badan Pekerja Majelis Syuro atau yang bernama Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) terdiri dari Ketua Majelis Syuro, Presiden dan Sekjen Partai, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Ketua Dewan Syariah dan Bendahara Umum. "Nah, kami di Fraksi (PKS) diminta melakukan kajian plus-minusnya, sosial-ekonomi termasuk dari sisi peraturan perundangan dan beragam kondisi yang ada. Kami sudah sampaikan kajian kami di fraksi. Rekomendasi sudah kami sampaikan ke DPP," ungkap Hidayat saat dihubungi Rakyat Merdeka Online pagi ini (Jumat, 30/5). "DPP kemudian mengkaji lagi dan menyampaikan keputusan DPP kepada rapat DPTP. Rapat DPTP ternyata, dengan beragam argumentasinya, menyetujui apa yang disulkan oleh DPP. Dalam konteks ini adalah menolak kenaikan harga BBM bersubsidi itu," tandas mantan Presiden PKS ini.<sup>173</sup>

<sup>173</sup> <http://www.rmol.co/road/2012/05/31/112698/Hidayat-Nur-Wahid-PKS-Tolak-Kenaikan->

Ini sama halnya dengan syura dalam pemikiran Ikhwanul Muslimin yang mengembalikan keputusan atas sebuah kebijakan kepada pemimpin jama'ah yang memiliki hujjah dalam syura.

Kedua, kemudian saya akan membahas tentang kesamaan konsep dan substansi syura IM dan musyawarah dalam parlemen liberal yang PKS geluti. Pada pasal dua tentang susunan dan kedudukan, DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Pada pasal tiga, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Pada pasal keempat tentang fungsi DPR, pada ayat satu dikatakan bahwa DPR memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Dalam syura dikatakan bahwa di antara persoalan yang mengharuskan diselenggarakannya musyawarah dalam masyarakat adalah menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan bagaimana metode pemilihan dan sistem evaluasi kinerjanya. Dalam hal ini, musyawarah identik dengan sistem perwakilan modern, karena keputusan dalam hal ini berdasarkan suara terbanyak atau kesepakatan. Hanya saja, syura memiliki keistimewaan bahwa ia memiliki perhatian terhadap pembangunan masyarakat yang penuh solidaritas berdasar kebebasan individu dan kesetaraan yang adil. Kebebasan harus ada sebelum musyawarah, karena ia merupakan landasan dan syarat keberadaannya.<sup>174</sup>

---

<sup>174</sup> Prof.Dr.Taufiq Yusuf Al-Wa'iy, *op.cit*, h 92.

Pada pasal 272 ayat 1, pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pada ayat kedua, dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.<sup>175</sup>

Ini memiliki kesamaan dengan pandangan Hasan al-Banna mengenai syura, bahwa syura itu bersifat mengikat. Jika terdapat suara yang berimbang, maka pemimpin jama'ahlah yang menimbang di antara keduanya. Dan cara semacam itu dipakai dalam setiap lembaga modern di sebagian besar penjuru dunia ini. Ini dibuktikan dari diwariskannya sebuah qanun (undang-undang) jama'ah yang disusun oleh tim yang terdiri dari 'Abdul Hakim 'Abidin, Thahir al-Khasysyab, dan Shalih al-'Asmawi. Dengan diketuai sendiri oleh Hasan al-Banna, tim itu mengajukan draf undang-undang tentang syura itu pada tahun 1948, setahun sebelum beliau wafat.

Terkait dengan hak dan kewajiban anggota DPR terdapat dalam pasal 11 yang terdapat pada tata tertib DPR. Anggota mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mengajukan usul rancangan undang-undang;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;

- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Protokoler;
- h. Keuangan dan administratif.<sup>176</sup>

Sedangkan kewajibannya pada pasal 12 adalah sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila;
- b. Melaksanakan UUD NKRI Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah negara;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;

- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;  
dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.<sup>177</sup>

Kesamaan antara keduanya terlihat dari beberapa poin hak dan kewajiban anggota DPR. Diantaranya adalah pada poin a, b, dan c itu ada dalam konsep sistem syura yang Ikhwanul Muslimin. Buktinya adalah mengenai esensi syura yang didalamnya dibahas mengenai kemerdekaan individu dalam hal menyampaikan pendapat atas dasar prinsip yang sejajar dengan yang lain, untuk mendiskusikan dengan pendapat yang lain, dan untuk memilih pemimpin. Barangsiapa tidak menikmati kebebasannya maka tidak ada nilai apa pun pada pendapatnya dan tidak ada artinya ia terlibat dalam syura. Makna syura sesungguhnya adalah solidaritas masyarakat yang dibangun atas kebebasan bermusyawarah dan berdialog secara terbuka yang bersandarkan pada kesetaraan dalam hak berpikir dan membela pendapat.

Kemudian tujuan syura adalah merealisasikan sebesar-besarnya kadar kemerdekaan untuk berpikir di atas landasan keadilan, kerjasama, dan solidaritas. Keadilan, kebebasan, dan solidaritas dalam masyarakat itu lebih dulu adanya daripada lahirnya kekuasaan dan negara. Demikian itu, karena landasan afiliasi individu kepada jamaah dan partisipasinya dalam memudahkan penyelesaian berbagai persoalannya, adalah tujuan dari adanya negara.<sup>178</sup> Antara DPR dan

---

<sup>177</sup> Ibid.

<sup>178</sup> Prof:Dr.Taufiq Yusuf Al-Wa'iy, *op.cit*, h 92.

syura Al-Ikhwan sama-sama menekankan dalam kewajibannya yaitu berfokus kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ini berarti bahwa anggota dewan dan syura harus mementingkan kewajibannya dalam mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok.

Dalam syura memiliki keistimewaan bahwa ia memiliki perhatian terhadap pembangunan masyarakat yang penuh solidaritas berdasar kebebasan individu dan kesetaraan yang adil. Kebebasan harus ada sebelum musyawarah, karena ia merupakan landasan dan syarat keberadaannya.<sup>179</sup>

Syura IM dan Musyawarah di parlemen memiliki kesamaan sebagai media penyalur aspirasi umat atau rakyat, syura memiliki makna tidak hanya terkait dengan arena politik, tetapi juga memiliki sandaran teologis yang kuat dalam menyelesaikan problem umat secara adil. Tidak hanya tentang sosial dan politik. Di parlemen juga terdapat sandaran landasan yang kuat yaitu pancasila dan undang-undang dasar. Musyawarah di DPR berkaitan dengan seluruh bidang kehidupan tidak hanya politik saja.

Memang dalam implementasinya, syura dalam konsep yang diinginkan IM tidak tercapai karena mereka sampai pada tahun 2010 pun belum masuk dan menguasai suara mayoritas di parlemen Mesir. Setelah pada tahun 2011, Partai Kebebasan dan Keadilan (PKK) memenangkan pemilihan umum legislatif dan tahun berikutnya Muhammad Mursi menjadi presiden Mesir. Di dalam parlemen,

PKK memasukkan esensi syura dan nilai-nilai Islam dalam kebijakan serta produk

undang-undang. Ini dibuktikan dari hasil referendum konstitusi baru 63,8 persen rakyat Mesir setuju atas referendum.<sup>180</sup> Dimana konstitusi baru itu beberapa diantaranya berisi syari'ah Islam menjadi sumber hukum tertinggi dalam undang-undang Mesir. Walaupun, kalangan nasionalis-sekuler tidak setuju dengan pasal ini, mereka tak berdaya mengalahkan kehendak rakyat Mesir.

Tabel di bawah ini akan menjelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.2

No.	Kesamaan Pandangan dalam menjalankan Fungsi Parlemen dengan sistem Syura
1.	Syura dalam pemikiran Ikhwanul Muslimin yang mengembalikan keputusan atas sebuah kebijakan kepada pemimpin jama'ah yang memiliki hujjah dalam syura. Perilaku PKS dalam parlemen liberal, ketika dalam penentuan kebijakan mengenai setuju atau tidak setuju, PKS mengembalikan kepada Majelis Syura dalam struktur internal. Keputusan Majelis Syura adalah final yang akan diikuti oleh anggota yang masuk dalam parlemen ini. Berarti pemimpin dalam Majelis Syura memiliki hujjah dalam menentukan kebijakan.
3.	Syura IM dan Musyawarah dalam parlemen bersifat mengikat. Artinya, undang-undang menyatakan keharusan dan memegang pandangan mayoritas.
4.	Di dalam syura IM, menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan bagaimana metode pemilihan dan sistem evaluasi kinerjanya. Dalam hal ini, musyawarah identik dengan sistem perwakilan modern, karena keputusan dalam hal ini berdasarkan suara terbanyak atau kesepakatan. Ini berarti keduanya memiliki kesamaan dalam mekanisme dan metode pemilihan anggota dewan atau syura, serta evaluasi kerjanya. Walau dengan bentuk yang berbeda tapi dengan substansi yang hampir sama.
5.	Syura dan Musyawarah di parlemen memiliki kesamaan sebagai media

<sup>180</sup> <http://www.voaindonesia.com/read/opini/2012/12/27/22533/presiden-mohammad-mursi-mendukung-keputusan-kekonstitusian-baru-mesir/#twhbch-p7NzYrx0> dnbs diakses tanggal 20 Maret

penyalur aspirasi umat atau rakyat, syura memiliki makna tidak hanya terkait dengan arena politik, tetapi juga memiliki sandaran teologis yang kuat dalam menyelesaikan problem umat secara adil. Tidak hanya tentang sosial dan politik. Di parlemen juga terdapat sandaran landasan yang kuat yaitu pancasila dan undang-undang dasar. Musyawarah di DPR berkaitan dengan seluruh bidang kehidupan tidak hanya politik saja.
--

### C. Cara Transmisi Ideologi IM terhadap PKS

Pada masa lalu, pola transmisi gerakan dari Timur Tengah yang paling utama adalah melalui para alumni pendidikan di Timur Tengah. Mereka berkenalan dan mendalami pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah dan kemudian membawanya ke Indonesia dan menyebarkannya kepada komunitas mereka dengan gerakan dakwah. Meskipun mengalami perkembangan pola yang lebih kompleks, pola ini (alumni Timur Tengah sebagai transmitor ) masih menjadi pola utama transmisi gerakan revivalisme Islam kontemporer Timur Tengah ke Indonesia akhir-akhir ini. Transmisi ideologi dari Timur Tengah ke Indonesia memiliki beberapa pola atau cara.<sup>181</sup>

Secara umum, transmisi berlangsung melalui beberapa cara atau pola: *pertama*, perpindahan orang-orang (human movement), baik orang-orang Timur Tengah yang datang ke Indonesia maupun orang-orang Indonesia yang datang ke Timur Tengah untuk belajar dan kemudian kembali lagi ke tanah air dan menyebarkan ide-ide Islamisme yang ia dapatkan dari tempat dimana ia belajar.

Kedua, pendidikan (education and propagation) yang

dibantu dan didanai oleh pihak-pihak Timur Tengah. *Ketiga*, penerbitan buku dan pemanfaatan internet. Peredaran buku-buku dari Timur Tengah ke Indonesia secara penerjemahan buku-buku Arab ke dalam Bahasa Indonesia sangat memudahkan masyarakat mempelajari gagasan dan pemikiran dari Timur Tengah tersebut. Demikian juga internet. Media komunikasi yang canggih ini turut memudahkan akses masyarakat Indonesia terhadap gagasan Islam Timur Tengah.<sup>182</sup>

### **1. Beasiswa Kuliah di Timur Tengah**

Menurut McAdam, konteks internasional kesempatan politik digunakan dalam rangka melawan kecenderungan para sarjana gerakan sosial yang terlalu fokus, acapkali secara tak sengaja, pada perspektif negara (*state-centered*). Dalam hal ini, selain faktor-faktor domestik, dimensi-dimensi internasional juga membantu menjelaskan munculnya Jamaah Tarbiyah dan sayap politiknya, yakni PKS.

Faktor internasional pertama yang mendorong gerakan revivalisme Islam di Indonesia yang memfasilitasi munculnya Jamaah Tarbiyah adalah kemenangan Revolusi Islam di Iran. Seperti yang telah dijelaskan banyak sarjana, kebangkitan Islam dimaknai sebagai bentuk peneguhan keislaman melawan dominasi kultural dan politik Barat.<sup>183</sup> Kelompok revivalis menilai bahwa keunggulan budaya Barat yang termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai tahap tertinggi imperialisme dan “invasi budaya” Barat yang menggerogoti otentisitas Islam dan

---

<sup>182</sup> *Ibid*, hh 85-86.

<sup>183</sup> Burhanuddin Muhtadi, *op.cit*, h 96.

dasar-dasar identitas sosial-kultural umat Islam. Sebagai buah dari Revolusi Iran 1979, kelompok-kelompok revivalis di banyak negara Muslim merasa sudah saatnya bagi kekuatan-kekuatan Islam untuk menjungkalkan rezim-rezim yang didukung oleh Barat seperti nasib Syah Iran yang menerapkan praktik otokratik sekuler. Secara psikologis dan politik, kaum revivalis Muslim terinspirasi untuk melakukan hal yang sama di negara-negara mereka.

Faktor internasional lain yang membantu munculnya Jamaah Tarbiyah adalah menguatnya hubungan antara kelompok Islam-modernis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Arab Saudi. DDII berperan vital dalam pengembangan gerakan dakwah kampus. Pada waktu yang berdekatan, Revolusi Iran 1979 disambut dengan gegap gempita dan antusiasme yang luar biasa di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Sebagai bagian rivalitas panjang antara Sunni dan Syiah, Arab Saudi kemudian berusaha memperluas pengaruh garis teologis dan politiknya di Dunia Islam untuk mencegah semakin besarnya dominasi Iran. DDII menekankan titik krusial perbedaan Islam Sunni (yang dianut oleh mayoritas Muslim Indonesia) dan Islam Syiah (yang dianut oleh mayoritas Iran).<sup>184</sup> Seorang ideolog awal PKS yang memiliki kedekatan jejaring dengan DII, Abu Ridho mengatakan :

*"Pertama-tama, kami berpikir bahwa Revolusi Iran 1979 adalah kemenangan Islam. Baru kemudian kami menyadari bahwa Syiah adalah sekte yang diakui secara resmi di Iran. Kami kemudian menilai Revolusi Iran itu secara*

*Liberalistik dan berorientasi kebaruan revolusi tersebut bukanlah representasi*

*Islam, tapi -dan ini yang lebih penting- adalah kemenangan Syiah di pentas dunia."*<sup>185</sup>

Sebagai organisasi Islam yang memiliki kedekatan jejaring dan garis ideologis dengan Arab Saudi, DDII tetap berpegang pada pandangan bahwa Syiah telah menyimpang secara total dari Islam. DDII dan Arab Saudi memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Arab Saudi menjadikan DDII sebagai mitra ideologis di Indonesia. Sementara pada 1970-an DDII memanfaatkan kedekatannya dengan mengirim sejumlah mahasiswa untuk memperdalam studi-studi Islam di Arab Saudi dengan beasiswa yang diberikan oleh kerajaan tersebut. Ketika itu DDII memerlukan banyak sumber daya manusia yang menguasai ilmu agama dalam rangka menyukseskan gerakan dakwah kampus yang digagas oleh tokoh-tokohnya. Waktu itu kegairahan aktivisme Islam dan antusiasme Islam (al-Sahwa al-Islamiyyah) sedang melanda universitas-universitas Saudi. Gejala kebangkitan semangat keberislaman ini dimulai sejak rezim Arab Saudi yang berkuasa menampung sejumlah besar aktivis Ikhwanul Muslimin dari Suriah dan Mesir yang berhasil lolos dari penindasan dan represi politik di negara asal mereka. Aktivis Ikhwanul Muslimin menyuntikkan semangat revivalisme Islam melalui dunai pendidikan tinggi di Arab Saudi.<sup>186</sup>

Ada beberapa alasan yang melatari kesediaan Pemerintah Arab Saudi untuk merekrut para pelarian Ikhwanul Muslimin dari Mesir dan Suriah. Pertama adalah pertimbangan geopolitik atau tarik menarik kepentingan politik kawasan

antara Arab Saudi dengan kelompok sosialis sekuler yang berkuasa di Mesir (Nasser) dan Suriah (Partai Ba'ats). Kedua adalah kepentingan pragmatis Pemerintah Arab Saudi yang ketika saat itu membutuhkan jasa pekerja-pekerja profesional menyusul melambungnya harga minyak dunia. Naiknya harga minyak dunia menjadi berkah tersendiri bagi Pemerintah Arab Saudi sehingga pemerintah memiliki dana berlimpah yang ditujukan untuk memperbaiki sektor-sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial bagi warganya. Para aktivis Ikhwanul Muslimin –yang sebagian besar berasal dari kalangan terdidik dan profesional- berperan penting di tengah minimnya sumber daya manusia di Arab Saudi. Khusus dalam bidang pendidikan, aktivis Ikhwanul Muslimin mendesain sistem pendidikan dan kurikulum di sekolah-sekolah dan universitas-universitas negeri di Arab Saudi. Ideolog awal PKS Abu Ridho, yang pada masa itu dikirim DDII ke Arab Saudi untuk kuliah agama, menceritakan bahwa sebagian besar buku yang menjadi koleksi di perpustakaan-perpustakaan universitas pada 1970-an ditulis aktivis Ikhwanul Muslimin. Tidak heran jika kemudian alumni-alumni Arab Saudi dipengaruhi oleh model aktivisme dan pemikiran Ikhwanul Muslimin. Di atas segalanya, “impor” kalangan profesional dan terdidik dari kalangan Ikhwanul Muslimin Mesir dan Suriah ini juga bertentangan dengan garis ideologi Wahabi maupun Ikhwanul Muslimin –betapa pun memiliki perbedaan pandangan – berasal dari “rumpun teologis” yang sama: Sunni.<sup>187</sup>

Kemudian, dalam proses transmisi gerakan revivalisme Islam Timur Tengah ini ke Indonesia melalui para aktivis dakwah Tarbiyah Salafi Hizbut

Tahrir, Mohammad Natsir, dan DDII memegang peran penting. DDII menjadi motor utama program pengiriman mahasiswa ke Indonesia ke Timur Tengah. Lembaga ini juga adalah penggagas awal gerakan dakwah kampus dan berperan cukup penting dalam menyebarkan ide-ide revivalisme Islam Timur Tengah melalui penerjemahan buku. Selain itu, lembaga yang dimotori oleh Mohammad Natsir ini juga memegang peran kunci dalam membangun hubungan langsung antara tokoh-tokoh gerakan di Timur Tengah dengan para tokoh Islam di Indonesia. Dengan kata lain, meskipun PKS, Hizbut Tahrir, dan DDII memiliki silsilah ideologi serta genealogi pemikirannya masing-masing, namun DDII berperan sebagai “ibu susuan” (umm ar-radha’ah) bagi ketiga gerakan tersebut.

Ada beberapa peran penting DDII yang sangat menentukan proses transmisi ini: *pertama*, DDII menjadi lembaga Islam pertama yang mengusahakan secara serius dan terorganisasi pengiriman mahasiswa ke Timur Tengah. Sebelum peran ini diambil alih oleh Departemen Agama, lembaga yang dipimpin oleh Mohammad Natsir ini menjadi agen utama untuk distribusi beasiswa dari Rabithah Alam Islami yang didukung dana oleh Saudi Arabia untuk belajar di Timur Tengah. Untuk memudahkan hubungan dengan Saudi Arabia. Pada tahun 1970-an, DDII bahkan telah membuka kanyor di Riyadh. Hingga tahun 2004, DDII telah mengirim 500 mahasiswa ke Timur Tengah dan Pakistan. Para alumnus pendidikan Timur Tengah inilah yang menjadi aktor-aktor utama penyebaran gerakan revivalisme Islam ke Indonesia, khususnya gerakan Tarbiyah

*Kedua*, DDII dan Mohammad Natsir juga menjadi penggagas serta mediator berdirinya lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) yang merupakan cabang dari Universitas Islam Muhammad Ibn Sa'ud di Riyadh. Lembaga ini telah meluluskan ribuan alumni yang menjadi agen Salafi serta aktor penting di kalangan gerakan Tarbiyah. *Ketiga*, DDII pulalah yang meletakkan landasan wala gerakan dakwah kampus (jaringan Lembaga Dakwah Kampus) dengan program Latihan Mujahid Dakwah di Masjid Salman ITB. Gerakan ini pada gilirannya menjadi embrio dari munculnya gerakan Tarbiyah (PKS), dan Hizbut Tahrir, serta memberikan andil cukup besar bagi perkembangan gerakan Salafi.

## **2. Kerjasama Pendidikan antara Indonesia dan Arab Saudi**

Cara atau pola kedua transmisi ideologi ini lewat kerjasama pendidikan Indonesia dan Arab Saudi. Kerjasama ini diinisiasikan dan dimediasi oleh DDII dan Mohammad Natsir.

Kerajaan Arab Saudi kemudian mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta pada 1980, yang merupakan cabang dari Universitas Islam Muhammad Ibn Sa'ud di Riyadh. Pendirian LIPIA ditujukan untuk mempererat hubungan bilateral dengan Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Pada 1980-an dan 1990-an, para pengajar LIPIA kebanyakan dipengaruhi gagasan dan pemikiran Ikhwanul Muslimin. Koleksi buku perpustakaan LIPIA juga sebagian ditulis oleh ideolog-ideolog Ikhwanul Muslimin. Hal ini dikonfirmasi oleh elite PKS seperti Mahfudz Siddiq yang

menyatakan bahwa LIPIA berperan penting dalam menyebarkan bukan hanya pemikiran melainkan juga model gerakan Ikhwanul Muslimin (*makhraj haraki*) di Indonesia. DDII, Lembaga ini telah meluluskan ribuan alumni yang menjadi agen Salafi serta aktor penting di kalangan gerakan Tarbiyah.

### **3. Penerjemahan Buku-buku Karya Ulama Ikhwanul Muslimin**

Cara atau pola transmisi terakhir adalah lewat penerjemahan buku-buku Karya Ulama Ikhwanul Muslimin ke Bahasa Indonesia dan Melayu. Dalam proses transmisi dan penyebaran berikutnya, peranan buku-buku dan media cetak ini sangatlah besar. Buku-buku tentang Ikhwanul Muslimin dan tokoh-tokohnya telah banyak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Buku-buku semacam ini sangat mendominasi pasar buku Islam saat ini. Bahkan, buku-buku tersebut juga diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang secara ideologis tidak terkait dengan gerakan Islam ini. Mereka menerbitkan buku-buku itu semata-mata atas pertimbangan keuntungan finansial. Hal ini memberikan peluang seluas-luasnya kepada para aktivis dakwah dan masyarakat untuk berkenalan dan mendalami pemikiran-pemikiran revivalis dari Timur Tengah.

Ada beberapa faktor yang membuat banyaknya buku terjemahan itu ke Indonesia. Pertama, ini ditunjukkan dengan pertautan antara kelompok revivalis Indonesia dan koleganya dari Malaysia adalah dimensi internasional lain yang berkontribusi bagi kemunculan Jamaah Tarbiyah. Menurut Untung Wahono, pada awal 1970-an banyak aktivis muda Muslim Indonesia yang berhubungan dengan kelompok-kelompok revivalis di Malaysia. Relasi ini lebih bersifat simbiosis

mutualisme. Sejumlah tulisan Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, dan ideolog revivalisme Islam terkemuka lain telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu, terutama oleh Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Pada awal 1970-an, ketika nuansa kebangkitan Islam mulai muncul di permukaan, kegairahan beragama di kalangan mahasiswa kampus-kampus sekuler di Indonesia yang secara umum tidak memiliki kemampuan Bahasa Arab yang mumpuni sangat terbantu dengan hadirnya buku-buku terjemahan yang dipublikasikan oleh kolega mereka di Malaysia. Inisiator Lembaga Mujahid Dakwah, Imaduddin Ibrahim, yang menjadi dosen di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) di Kuala Lumpur, membawa buku-buku Ikhwanul Muslimin terbitan Malaysia ke Indonesia.<sup>188</sup>

Tak mengherankan jika kemudian pengaruh model aktivisme dan pemikiran Ikhwanul Muslimin Mesir begitu kental terlihat dalam wacana dan gerakan politik Jamaah Tarbiyah. Yusuf Qardhawi, ulama Mesir yang sangat berpengaruh dan pernah menjadi salah satu elite Ikhwanul Muslimin, menyebut kendaraan politik Tarbiyah, yakni PKS, sebagai perpanjangan tangan (*imtidad*) dari Ikhwanul Muslimin. Mashadi, mantan anggota legislatif asal Partai Keadilan, mengakui bahwa PKS terinspirasi oleh intisari dan model gerakan Ikhwanul Muslimin. Alasan utamanya, kata Mashadi, karena kelompok Islamis Mesir ini menawarkan pemahaman yang komprehensif dan solid mengenai ajaran-ajaran Islam ketimbang sibuk dengan menenggelamkan diri dalam perdebatan teologis

yang abstrak. Tak berbeda dengan Ikhwanul Muslimin, PKS lebih

memprioritaskan wilayah gerakan dan penetrasi politik ketimbang aktivitas dakwah dalam pengertian konvensional.

Dalam rangka mencari justifikasi hubungan intim antara Ikhwanul Muslimin dan PKS agar bisa Untuk lebih objektif lagi, hubungan antara PKS dengan Ikhwanul Muslimin agar bisa lebih di terima secara lebih luas. Hidayat Nurwahid mencoba memberikan perspektif nasionalistik atas kontribusi Ikhwanul Muslimin terhadap pengakuan kemerdekaan Indonesia.<sup>189</sup> Mesir adalah Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah itu diikuti Negara-negara Timur Tengah lainnya. Menurut Hidayat, pengakuan tersebut tak bisa dilepaskan dari peran Ikhwanul Muslimin. Dalam kunjungan resmi ke Mesir pada tahun 1947, Haji Agus Salim dan Dr.H.M. Rasyidi bersilaturahmi ke kantor pusat Ikhwanul Muslimin dan menghanturkan rasa terima kasih kepada Hasan al-Banna karena dukungannya terhadap kemerdekaan.<sup>190</sup> beberapa kalangan menuding pengakuan Hidayat Nurwahid dan K.H Rahmat Abdullah sebagai justifikasi *post-factum* yang ditujukan untuk membesar-besarkan Ikhwanul Muslimin dalam kemerdekaan Indonesia. Sumber-sumber historis menunjukkan bahwa pada 1940-an, mayoritas masyarakat Mesir dan aktivitas-aktivitas politik negara tersebut, termasuk kelompok-kelompok nasionalis-sosialis sekuler, juga sangat mendukung kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.

*Kedua*, DDII juga berperan secara tidak langsung dalam mendorong penerimaan karya-karya dari pemikir utama gerakan revivalisme Islam Timur

Tengah ke dalam Bahasa Indonesia. Jadi, sebelum gerakan Islam baru ini eksis, lembaga ini telah aktif mendistribusikan buku-buku terjemahan karya Hasan al-Banna, Yusuf al-Qardhawi, Sa'id Quthb, dan Abu Ala Maududi.